



KR-Riyana Ekawati
Petugas melakukan uji emisi kendaraan bermotor di Kawasan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (10/10/2023).

UJI EMISI DI KAWASAN SUMBU FILOSOFI

Periksa 102 Kendaraan, 17 Tak Lolos

YOGYA (KR) - Guna mendukung Malioboro dan sekitarnya sebagai bagian dari Kawasan Sumbu Filosofi yang telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia dengan skema low emission zone rendah emisi, dilakukan uji emisi terhadap ratusan kendaraan bermotor roda dua dan empat yang melintasi kawasan Malioboro.

Uji emisi dilaksanakan Dinas Perhubungan DIY di depan Kantor DPRD DIY, Malioboro, Selasa (10/10). Hasilnya, dari 102 kendaraan bermotor yang diperiksa, 17 di antaranya dinyatakan tidak lolos uji.

"Uji emisi di Kawasan Sumbu Filosofi ini kami lakukan sebagai upaya memitigasi dan mengukur seberapa besar emisi yang ditimbulkan kendaraan bermotor terutama di Kawasan Sumbu Filosofi. Diharapkan hal ini bisa mengurangi tingkat polusi udara yang salah satu sumber

utamanya dari emisi kendaraan bermotor," kata Plh Kepala Dinas Perhubungan DIY Sumariyoto.

Sumariyoto mengatakan, uji emisi dilakukan untuk mengetahui tingkat zat-zat berbahaya yang dihasilkan kendaraan bermotor, yang tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan manusia. Dengan melakukan uji emisi secara teratur, diharapkan Pemerintah dapat menilai dan mengendalikan kadar emisi yang dikeluarkan kendaraan

bermotor. Pengendalian emisi gas buang kendaraan menjadi suatu hal yang sangat diperlukan. Sedangkan sasaran uji emisi kendaraan berbahan bakar solar, bensin, hingga sepeda motor.

"Dari 27 kendaraan berbahan bakar solar yang diuji sebanyak 17 kendaraan dinyatakan tak lolos uji emisi. Dari total itu, jumlah kendaraan yang tidak lolos semuanya rata-rata berbahan bakar solar karena kadar kepekatan asapnya (opasitas). Sedangkan untuk kendaraan berbahan bakar bensin diperiksa sebanyak 39 kendaraan dan seluruhnya dinyatakan lulus uji emisi," terang Sumariyoto, seraya menambahkan, untuk kendaraan yang tak lolos uji emisi tersebut tidak diberlakukan sanksi tilang. Petugas hanya melakukan edukasi

dan sosialisasi terhadap pengemudi.

Menurut Sumariyoto, uji emisi di Kawasan Sumbu Filosofi baru pertama kali dilakukan menyusul penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia dari UNESCO. Selain itu terkait rencana Malioboro sebagai kawasan pedestrian pada 2025 mendatang. Penetapan oleh UNESCO juga membawa konsekuensi pelestarian kawasan ini. Salah satunya terkait lalu lintas dan polusi udara.

"Rencananya, konsep Malioboro nantinya adalah full pedestrian yang ditargetkan pada 2025. Jadi kendaraan tidak bermotor plus Bus Trans Jogja saja yang bisa masuk. Sedangkan kendaraan bermotor meskipun rendah emisinya wacananya dilarang masuk Kawasan Malioboro," imbuhnya.

(Ria)-f

PROMOSIKAN PARIWISATA

Pemkab Belitung Siap Kerja Sama dengan SKH KR



KR-Franz Boedisukamanto
Sekda Kabupaten Belitung Mz Hendra Caya menyerahkan cenderamata kepada Komisaris Utama PT BP KR Prof Dr Inajati Adrisijanti.

atannya bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung MZ Hendra Caya beserta jajaran staf mengunjungi Kantor Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Kunjungan tersebut diteri-

ma oleh Komisaris Utama PT Kedaulatan Rakyat Prof Dr Inajati Adrisijanti, serta jajaran Direksi dan Pemimpin Redaksi KR dan Merapi serta jajaran redaksi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung MZ Hendra Caya mengatakan jika

Pemkab Belitung ingin bekerja sama dengan KR terhadap program, baik wisata, ekonomi dan pembangunan.

"KR menjadi media yang bagus sebagai penyedia informasi, terlebih untuk promosi wisata Belitung yang istimewa. Kami ingin bela-

jar dari Yogya melalui KR yang menjadi media tertua di Indonesia," tutur Hendra Caya.

Komisaris Utama PT Kedaulatan Rakyat Prof Dr Inajati Adrisijanti mengatakan jika Kedaulatan Rakyat ingin memberi pemanfaatan positif dalam memberi informasi yang baik bagi masyarakat.

"Peran media sebagai pemberi informasi ke masyarakat. Di satu sisi, KR memiliki emotional appeal sebagai penggalang amal untuk pembangunan sarana prasarana akibat bencana atau nonbencana," tutur Inajati.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Belitung Dr Zakina SSos MSI menambahkan jika Pemkab Belitung telah banyak strategi untuk menjalin kerja sama dengan media.

(* -3)-d

SOAL TUMPUKAN SAMPAH DI KOTABARU

Gubernur Ingatkan Pemkot Yogya

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten (Pemkot/Pemkab) untuk serius dalam menangani sampah. Sultan juga berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya mengolah dan meminimalisasi sampah karena realisasi investasi pengolahan sampah baru akan terlaksana pada 2024 mendatang.

"Itu (sampah) bagian-bagian kabupateng/kota. Kemarin kami coba melihat di Kotabaru, kita ingatkan untuk kebersihan bisa diangkut. Ya kami masih, semua pihak kan sudah mau investasi, tapi realisasi mesinnya kan masih tahun depan," kata

Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/10).

Menurut Gubernur, Pemkot Yogyakarta tengah berupaya mengatasi masalah sampah dengan mengadakan teknologi pembakar sampah atau insenerator. Bahkan sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk berinvestasi dan mengembangkan teknologi tersebut. Tapi belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat, realisasinya baru bisa dilakukan pada 2024.

"Memang sudah ada yang tertarik untuk berinvestasi, tapi memang realisasi mesinnya baru tahun depan. Tapi (Pemkot) punya kemauan, jadi nanti mulai tahun depan mereka sudah ada proses pakai

mesin," ujar Sultan.

Untuk itu Sultan meminta masyarakat untuk memiliki kesadaran untuk mengolah sampahnya. Mengingat saat ini masih ditemui praktik membuang sampah sembarangan pascakuota pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan dibatasi. Akibatnya tumpukan sampah ditemukan di beberapa lokasi termasuk di pinggir-pinggir jalan.

"Ya sekarang warga masyarakat kesadarannya bagaimana? Atau memang masyarakat malas bawa ke depo atau memang sengaja ditinggal di pinggir jalan? Kami kan memonitor," kata Sultan.

(Ria)-d

PELAKSANAAN PEMILU 2024

Wapres Pastikan Papua Sudah Siap

JAYAPURA (KR) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan persiapan Pemilu 2024 di wilayah Papua sudah matang. Hal ini merujuk dari laporan yang diterima setelah memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) Terkait Update Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 (Empat) Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya.

"Dari laporan tadi disampaikan semua, sudah disampaikan," tegas Wapres saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (10/10).

Menurut Wapres, segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu telah disiapkan, termasuk berbagai hal teknis mulai dari anggaran hingga masalah keamanan. "Sudah disiapkan. Artinya segala sesuatunya termasuk masa-

lah teknis, masalah keamanan, penyelenggaraan, pembiayaan sudah siap," paparnya.

Senada dengan Wapres, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui koordinasi dan safari di seluruh wilayahnya. "Untuk rencana persiapan Pemilu 2024, kami sudah menyiapkan segala sesuatu, baik dari aspek keamanan kami terus melakukan koordinasi, kemudian safari yang digelar dari Polda, kemudian dari institusi keamanan lainnya di 4 daerah," ujarnya.

Selain itu, juga terus melakukan sosialisasi untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Papua. "Sudah dimulai dari kami dari Provinsi Papua Tengah. Kemudian untuk pembiayaannya dengan KPU dan persiapan-persiapan lainnya terus kami lakukan sosialisasi di tingkat masyarakat," ungkapnya.

Ribka menegaskan bahwa Pemilu merupakan agenda negara yang wajib dan harus dilaksanakan, sehingga masalah keamanan di Papua tidak boleh sampai mengganggu pesta demokrasi tersebut. "Saya pikir potensi-potensi itu akan diminimalisasi. Ada pihak keamanan," pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Wapres meminta masukan dari para tokoh agama hingga aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua untuk mencari akar masalah yang menghambat kesejahteraan dan keamanan di wilayah setempat. "Beliau (Wapres) katakan kami harus cari akar masalah, sehingga akar masalah bisa dirumuskan dalam rancangan induk. Bila rencana induk percepatan pembangunan Papua dirasa ada yang kurang, itu bisa ditambah," kata Perwakilan dari Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Fransina Yoteni usai berdialog dengan Wapres di Kantor Gubernur Papua.

(Ati)-d